

## MENGANALISIS KEBIJAKAN TRILATERAL AUKUS SEBAGAI UPAYA PENYEIMBANG DOMINASI TIONGKOK DI KAWASAN INDO-PASIFIK

Kristiyadi August Manaph<sup>1</sup>, Wira Atman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Departemen Ilmu Hubungan Internasional,  
Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received : June 2025

Revised : June 2025

Accepted : June 2025

Available online

Korespondensi: Email:

<sup>1</sup>[kristiyadiugustmanaph@gmail.com](mailto:kristiyadiugustmanaph@gmail.com)

<sup>2</sup>[Atmannyawiraaa@gmail.com](mailto:Atmannyawiraaa@gmail.com)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### Abstrak

Kebangkitan ekonomi Tiongkok yang diikuti oleh kebangkitan kekuatan militernya, telah menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Kekuatan militer yang meningkat memberi Tiongkok kapasitas untuk melakukan ekspansi dalam mewujudkan kepentingan nasional di kawasan sekitarnya. Pada September 2021, tiga negara, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Australia membentuk pakta keamanan trilateral yang dikenal dengan sebutan AUKUS. Kebijakan ini ditujukan sebagai respons terhadap dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Kebijakan trilateral ini mencakup kerja sama militer, transfer teknologi pertahanan, dan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir kepada Australia. Artikel ini akan secara khusus membahas lebih jauh terkait konsep kebijakan AUKUS dan menganalisisnya sebagai upaya penyeimbang ekspansi agresif yang dilakukan Tiongkok

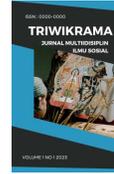
di kawasan Indo-Pasifik. Artikel ini juga akan membahas bagaimana peran ilmu hubungan internasional, khususnya penggunaan teori *balance of threat* dalam memahami situasi yang diciptakan dengan hadirnya kebijakan AUKUS ini. Dengan demikian, setelah memahami konsep tentang AUKUS secara utuh serta dampak yang mungkin ditimbulkan, artikel ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur, baik bagi para akademisi maupun para pembuat kebijakan dalam menghadapi serta menyikapi fenomena ini.

**Kata kunci:** AUKUS, Tiongkok, Indo-Pasifik, *balancing*, keamanan.

### Abstract

*China's economic rise, accompanied by the strengthening of its military capabilities, has raised concerns about stability in the Indo-Pacific region. This growing military power provides China with greater capacity to expand and pursue its national interests in surrounding areas. In response to these geopolitical dynamics, in September 2021, the United States, the United Kingdom, and Australia formed a trilateral security pact known as AUKUS. This pact includes military cooperation, defense technology transfer, and the development of nuclear-powered submarines for Australia. This article specifically discusses the concept of the AUKUS policy and analyzes it as a balancing effort against China's aggressive expansion in the Indo-Pacific region. Furthermore, it applies the balance of threat theory of international relations to better understand the dynamics created by AUKUS. Therefore, this article is expected to serve as a scholarly reference for academics and policymakers in strategically addressing this phenomenon.*

**Keywords:** AUKUS, China, Indo-Pacific, *balancing*, security.



---

## PENDAHULUAN

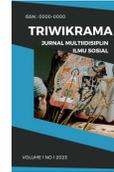
### Latar Belakang

Terbentuknya AUKUS pada September 2021 menjadi salah satu momen yang menandai perubahan lanskap geopolitik global dalam dua dekade terakhir dari fokus keamanan yang berpusat di kawasan Atlantik ke Indo-Pasifik. Kawasan ini kini menjadi pusat rivalitas antara kekuatan besar, terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Rivalitas ini pun mencakup berbagai dimensi, mulai dari ekonomi, hingga militer, dan teknologi. AUKUS membawa kepentingan bersama dari tiga negara dengan kekuatan yang besar yakni, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Hadirnya AUKUS yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keamanan bagi ketiga negara, malah mendatangkan kekhawatiran serta menimbulkan polemik baik bagi Tiongkok maupun kawasan Indo-Pasifik (Cheng, 2022). Merujuk pada konteks inilah, kemunculan AUKUS menjadi penanda penting atas meningkatnya ketegangan dan perlombaan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek, khususnya ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat memberi ruang bagi Tiongkok untuk mengembangkan elemen kekuatan nasionalnya termasuk kemampuan militernya. Kemampuan militer Tiongkok yang semakin mumpuni tidak hanya memungkinkannya untuk meningkatkan pertahanan, tetapi mendukung misi ekspansinya dalam mendominasi di luar kawasannya. Ekspansi ini meliputi berbagai dimensi, mulai dari ekonomi hingga keamanan regional. Melihat ambisi ekonomi Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) yang diumumkan Xi Jinping dan klaim atas Laut China Selatan, telah membangun persepsi ancaman bagi negara barat akan dominasi Tiongkok di kawasan. Kemampuan militer yang meningkat serta pergerakan agresif Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, telah menimbulkan kekhawatiran bagi blok barat akan potensi dominasi tunggal dari Tiongkok.

Rory Medcalf, dekan dari *Australian National University*, menjelaskan bahwa pembentukan AUKUS tidak terlepas dari strategi *counter balance* terhadap ekspansi pengaruh militer yang dilakukan oleh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Terlebih lagi jika kita melihat kasus Laut China Selatan yang kian memanas akibat klaim sepihak Tiongkok, hadirnya AUKUS disinyalir oleh Medcalf dapat menjadi penyeimbang dari pengaruh Tiongkok di kawasan. Kawasan Indo-Pasifik sebagai wilayah tempat bertemunya kepentingan ekonomi, militer, dan politik global menjadi konteks penting bagi kemunculan AUKUS. Namun, lebih dari sekadar respons terhadap dinamika kawasan, AUKUS merepresentasikan strategi besar blok Barat dalam menjaga tatanan internasional liberal dan mencegah dominasi unipolar yang berpotensi dikendalikan oleh Tiongkok (Mas'udi, 2020). Ini menjadikan AUKUS bukan hanya sekadar aliansi regional, tetapi juga alat strategis dalam manajemen distribusi kekuatan global.

Sejak diresmikan, AUKUS hadir dengan tujuan seperti yang diklaim oleh para pendirinya, meliputi pengembangan kecerdasan buatan (AI), sistem senjata hipersonik, dan yang paling kontroversial adalah transfer teknologi kapal selam bertenaga nuklir kepada Australia. Salah satu pilar utama AUKUS adalah transfer teknologi kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika Serikat dan Inggris kepada Australia sebagai sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya di luar aliansi nuklir formal. Selain itu, AUKUS juga mencakup kerja sama dalam bidang kecerdasan buatan, sistem bawah laut, keamanan siber, dan teknologi kuantum. Langkah ini dipandang bukan sekadar penguatan aliansi militer, tetapi sebagai manuver strategis untuk menyeimbangkan (*balancing*) dominasi Tiongkok, terutama dalam aspek kekuatan maritim dan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik.



Melihat gejolak yang timbul dengan hadirnya AUKUS, artikel ini akan melihat bagaimana peran ilmu hubungan internasional digunakan sebagai *standing point* dalam memahami situasi yang tersebut. Berlandaskan pemahaman ilmu hubungan internasional, artikel ini akan menelaah bagaimana teori *balance of threat* menjelaskan kehadiran AUKUS serta bagaimana keterkaitannya dengan keamanan kawasan Indo-Pasifik. Adapun konsep-konsep yang berakar dari realisme seperti *deterrence*, juga akan digunakan sebagai alat bantu untuk melihat fenomena yang dihadirkan AUKUS dalam dunia internasional.

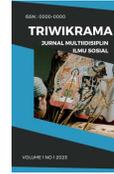
Dengan latar belakang tersebut, penting untuk dianalisis lebih jauh bagaimana AUKUS berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang terhadap kekuatan Tiongkok. Apakah pembentukan aliansi ini semata reaksi terhadap ancaman militer, ataukah merupakan bagian dari rekonstruksi arsitektur keamanan global yang lebih luas? Bagaimana efektivitas aliansi ini jika ditinjau dari parameter-parameter teoritis dalam ilmu hubungan internasional, khususnya teori *balance of threat*. Artikel ini akan berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan fokus pada dimensi strategis, militer, dan teknologi dari pembentukan AUKUS serta implikasinya terhadap struktur kekuatan internasional, terutama dalam menghadapi kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan dominan baru.

## KAJIAN TEORITIS

Dalam menganalisis fenomena kemunculan AUKUS, penulis akan menggunakan teori *balance of threat* sebagai kerangka berpikir untuk menjelaskan situasi yang tercipta melalui terbentuknya AUKUS serta mengaitkannya dengan konsep penyeimbangan kekuatan dengan Tiongkok. Teori *balance of threat* adalah kerangka analisis dalam ilmu hubungan internasional dan keamanan internasional yang dikembangkan oleh Stephen Walt, terutama dalam karyanya *Alliance formation and the balance of world power*. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika keamanan internasional yang lebih berfokus pada pembentukan aliansi.

Walt menjelaskan bahwa ancaman yang dirasakan (*perceived threat*) lebih menentukan pembentukan aliansi daripada sekedar besarnya kekuatan militer lawan. Walt menekankan bahwa ada empat faktor utama yang membentuk persepsi ancaman yakni, kekuatan agregat suatu negara, jarak geografis, kemampuan ofensif, dan niat agresifnya. Sebagai respons dari ancaman tersebut, negara dapat memilih antara *balancing* (bersekutu untuk menghadapi ancaman) atau *bandwagoning* (mengikuti kekuatan yang dianggap ancaman). Walt berargumen bahwa negara lebih suka *balancing* karena ingin mencegah dominasi kekuatan yang relatif lebih kuat.

Teori ini merevisi teori *balance of power* dengan argumen kunci bahwa yang direspons negara dari negara lain bukanlah kekuatannya melainkan tingkat ancamannya. Sekalipun kekuatan negara lain besar, hal itu belum tentu membuat suatu negara merasa terancam. Sesuai dengan pandangan neorealisme yang menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara tidak selalu dilandasi ambisi kekuasaan namun *status quo*. Maksudnya, negara hanya menerapkan kebijakan yang akan berkontribusi pada keamanannya dan bukan strategi ekspansionis. Neorealisme menekankan bahwa strategi terbaik adalah menahan diri, dengan menahan diri negara tidak akan mengirimkan sinyal ancaman kepada negara lain sehingga pada gilirannya akan mencegah terjadinya konflik.



## METODE PENELITIAN

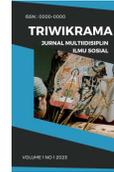
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena terbentuknya aliansi AUKUS dan implikasinya terhadap dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi data secara komprehensif dan analitis berdasarkan konteks historis, politik, dan strategis yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji literatur-literatur akademik, jurnal ilmiah, dokumen resmi, laporan kebijakan, serta pernyataan dari aktor-aktor terkait, baik dari negara anggota AUKUS maupun dari pihak Tiongkok dan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *balance of threat* yang dikembangkan oleh Stephen M. Walt. Teori ini menjadi alat bantu utama dalam memahami alasan pembentukan aliansi AUKUS, persepsi ancaman terhadap Tiongkok, serta strategi penyeimbangan kekuatan di kawasan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi empat variabel utama dari teori ini: kapabilitas agregat, kedekatan geografis, intensi agresif, dan kapabilitas proyeksi kekuatan ofensif. Seluruh data dan informasi dianalisis secara interpretatif untuk menyusun pemahaman yang koheren mengenai bagaimana AUKUS diposisikan sebagai strategi geopolitik dalam merespons dinamika kekuatan di kawasan Indo-Pasifik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Persepsi Ancaman yang Dihadirkan Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik

Sejak resmi terbentuk, AUKUS telah menarik begitu banyak perhatian para pengamat dan membawa dampak signifikan dalam dinamika geopolitik global. Pelebaran pengaruh dan ekspansi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik membuat ketiga negara ini merasa perlu mengambil langkah lebih jauh untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok. Hadirnya AUKUS disinyalir menjadi strategi blok barat untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Aliansi AUKUS dapat dipahami secara mendalam melalui lensa teori *balance of threat* yang dikembangkan oleh Stephen Walt (1985), teori akan memperkenalkan konsep bahwa negara - negara lebih terdorong untuk membentuk aliansi dalam merespons tingkat ancaman yang dirasakan, bukan hanya terhadap negara yang kuat, tetapi terhadap negara yang kuat dan dipersepsikan berbahaya. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan empat elemen kunci dalam teori *balance of threat* yang memengaruhi persepsi ancaman yakni, kapabilitas agregat, kedekatan geografis, intensi agresif, dan kapabilitas proyeksi kekuatan ofensif.

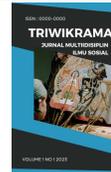
Kapabilitas agregat mencakup sumber daya keseluruhan suatu negara, termasuk kekuatan ekonomi dan militer. Tiongkok saat ini adalah kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia dan telah menjadi negara dengan anggaran pertahanan terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi Tiongkok telah dialokasikan untuk belanja pertahanan dengan anggaran militer yang mencapai lebih dari 225 miliar USD. Anggaran ini kemudian diinvestasikan untuk modernisasi militer Tiongkok, termasuk pengembangan angkatan laut, rudal hipersonik, dan teknologi luar angkasa. Kemandirian Tiongkok dalam industri pertahanan juga menjadi hal yang patut dipertimbangkan. Hadirnya perusahaan milik negara seperti NORINCO dan AVIC telah memungkinkan Tiongkok untuk memproduksi jet tempur generasi kelimanya (*J-20 Mighty Dragon*) dan mengembangkan kapal induk mandiri seperti Fujian, kapal induk dengan sistem peluncur elektromagnetik. Dengan demikian, kapabilitas agregat Tiongkok secara langsung mendasari ancaman potensialnya dan memperkuat persepsi bahwa Tiongkok bukan sekadar kekuatan regional, tetapi kekuatan sistemik. Hal ini juga membuktikan bahwa Tiongkok tidak hanya kuat dalam ekonomi, tetapi mampu mengonversi kekuatan tersebut ke dalam kemampuan militer yang mumpuni untuk kompetisi strategis.



Walt berpendapat bahwa ancaman meningkat ketika aktor yang kuat secara geografis dekat dengan negara lain, karena meningkatkan kemungkinan konflik langsung dan dominasi kawasan. Dalam konteks ini, Australia sebagai negara Pasifik Selatan melihat aktivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan, di Pasifik Selatan, dan di jalur maritim utama sebagai bentuk ancaman langsung terhadap stabilitas regional dan kedaulatan maritimnya. Pengaruh Tiongkok yang meluas ke wilayah seperti Kepulauan Solomon dan Vanuatu (yang menjalin kesepakatan keamanan dengan Beijing) menjadi alarm strategis bagi Canberra. Dalam kerangka ini, AUKUS menjadi cara untuk memperkuat perimeter keamanan Australia dan memproyeksikan kapabilitas ofensif dalam lingkup yang lebih besar, termasuk di jalur pelayaran strategis Indo-Pasifik.

Walt juga menjelaskan bahwa negara yang menunjukkan niat agresif akan dipandang sebagai ancaman yang lebih tinggi, terutama jika tindakan tersebut melibatkan ekspansi teritorial, intimidasi militer, atau penggunaan senjata secara koersif. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri Tiongkok yang menunjukkan klaim sepihak di Laut China Selatan merupakan bukti kuat dari intensi agresifnya. Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan berdasarkan sejarah, melalui *nine dash line* yang bertabrakan dengan klaim wilayah negara-negara ASEAN (Mas'udi, 2020). Klaim Tiongkok atas Laut China Selatan ini ditolak oleh Pengadilan Arbitrase Internasional (UNCLOS) pada 2016, namun Tiongkok menolak putusan tersebut dan tetap melanjutkan aktivitas ekspansinya. Tiongkok juga melakukan tindakan koersif terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti, kapal-kapal penjaga pantai dan misil Tiongkok kerap kali mengintimidasi kapal penangkap ikan dan eksplorasi energi negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini juga mengakibatkan bentrok diplomatik dan insiden fisik dengan Filipina dan Vietnam. Tiongkok juga telah melakukan reklamasi sejak tahun 2014 dan membangun tujuh pulau buatan di Kepulauan Spratly dan beberapa pulau lainnya di kawasan Laut China Selatan. Beberapa di antara pulau ini dilengkapi dengan landasan pacu militer, sistem radar dan pertahanan udara, dan hanggar untuk jet tempur serta pelabuhan militer. Kombinasi dari beberapa tindakan ekspansif yang dilakukan Tiongkok menunjukkan bahwa Tiongkok bukan hanya negara yang kuat, tetapi juga menunjukkan tekad yang nyata. Hal ini kemudian memperkuat persepsi ancaman di mata Negara Barat dan sekutunya.

Elemen terakhir merujuk pada kapabilitas proyeksi kekuatan Tiongkok. Tiongkok telah membuat lompatan besar dalam hal memproyeksikan kekuatannya di luar kewasannya sendiri. *People's Liberation Army Navy* (PLAN) kini telah menjadi angkatan laut terbesar di dunia dalam hal jumlah kapal perang, dengan lebih dari 370 kapal aktif disertai dengan kapal induk dan kapal selam nuklir dengan rudal balistik (SSBN) dan kapal selam bertenaga nuklir (SSN). Hal ini terus dilanjutkan Tiongkok dengan melakukan ekspansi militer luar negeri seperti yang dilakukan Tiongkok di Djibouti (Afrika) hingga latihan tembak langsung di Teluk Tonkin dan Laut Tasman yang semakin memperkeruh suasana keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Kapabilitas ini dengan jelas menunjukkan bahwa Tiongkok tidak hanya berfokus pada keamanan nasional, tetapi pada kemampuan memproyeksikan kekuatan secara ofensif, baik secara regional maupun global. Hal ini meningkatkan persepsi bahwa Tiongkok memiliki niat dan kemampuan untuk mengubah *status quo* internasional, yang memicu pembentukan mekanisme penyeimbang seperti AUKUS.



## 2. AUKUS Sebagai Respons Ancaman yang Dihadirkan Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik

Kawasan Indo-Pasifik merupakan ruang strategis yang vital secara geostrategis dan geoekonomi, menjadi jalur utama 60% perdagangan maritim dunia. Dominasi tunggal dari satu aktor negara di kawasan ini akan berisiko menciptakan sistem regional yang tidak seimbang dan koersif. Dalam konteks ini, munculnya Tiongkok sebagai aktor dominan di kawasan menimbulkan kekhawatiran akan ancaman yang mungkin ditimbulkan dari upaya dominasi Tiongkok. AUKUS hadir dengan memainkan peran sebagai penyeimbang dan penghalang ekspansi zona pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik (Imannurdin, 2022). Melalui AUKUS, kekuatan kolektif dari AS, Inggris, dan Australia dapat membentuk front pertahanan defensif untuk mencegah terjadinya klaim oleh Tiongkok terhadap Taiwan, atau dominasi permanen di Laut China Selatan, dan secara keseluruhan membawa suasana yang lebih kondusif di kawasan.

Pembentukan AUKUS mencerminkan respons terhadap kapabilitas Tiongkok yang kemudian membuat Amerika Serikat dan Inggris secara strategis mentransfer kapasitas militer yang sangat sensitif (kapal selam bertenaga nuklir) kepada Australia, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya kecuali antara AS dan Inggris. Walau tujuan transfer kekuatan militer ini bersifat non-ofensif dan lebih mengutamakan tujuan defensif, hal ini menunjukkan bahwa kekuatan militer Tiongkok telah melewati ambang yang membuat Negara Barat merasa perlu melakukan penyeimbangan. Walau dalam praktiknya AUKUS masih memilih penyeimbangan secara halus (*soft balancing*). AUKUS dalam hal ini bukan hanya upaya menyeimbangkan kekuatan, tetapi juga mereduksi niat ofensif Tiongkok melalui peningkatan postur pertahanan kolektif.

Ketiga negara ini walau menunjukkan tindakan kolektif dalam pembentukan AUKUS, tetapi maksud dan tujuan dari masing-masing negara menjadi hal yang patut untuk dianalisis sebagai faktor pembentukan AUKUS itu sendiri. Amerika Serikat sebagai pemrakarsa utama AUKUS memandang bahwa aliansi sangat dibutuhkan dalam konteks menyeimbangkan pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik serta ancaman yang dibawanya. Presiden Joe Biden dalam pidatonya mengungkapkan “*AUKUS is about investing in our greatest source of strength, our alliances, and updating them to better meet the threats of today and tomorrow.*” Dalam pidatonya, Joe Biden menjelaskan bahwa AUKUS akan menjadi sarana yang mengkonsolidasikan jaringan sekutu regional untuk berbagi beban dalam menghadapi kebangkitan Tiongkok. Inggris memandang AUKUS sebagai langkah untuk memperluas pengaruh dan ruang gerak strategis di Indo-Pasifik. Inggris juga menjamin komitmen untuk menjalin kemitraan dalam industri pertahanan jangka panjang dan memastikan akses ke kolaborasi teknologi militer tingkat tinggi. Australia memandang AUKUS sebagai salah satu solusi untuk memperkuat kemampuan militernya dan menjamin otonomi strategisnya. Dengan AUKUS, Australia mendapatkan akses eksklusif terhadap teknologi militer nuklir dan AI, yang dipercaya akan memperkuat kemampuannya untuk menahan agresi Tiongkok dan menjaga kepentingan nasionalnya dimasa yang akan datang.

Dengan menanamkan dimensi militer ke dalam struktur aliansi berbasis teknologi, AUKUS dapat dipandang sebagai inovasi dalam arsitektur keamanan kawasan. AUKUS menunjukkan bahwa penyeimbangan tidak selalu dilakukan melalui pengerahan militer secara langsung, tetapi melalui perubahan struktur kemampuan jangka panjang. Dengan kata lain AUKUS tidak hanya dipandang sebagai respons militer, tetapi strategi *balancing* terhadap ancaman Tiongkok dengan menggunakan peningkatan kemampuan berbasis militer teknologi. Arsitektur keamanan kawasan dalam konteks ini tidak hanya mencakup struktur formal, tetapi juga norma, pola interaksi, dan jaringan aliansi informal yang membentuk distribusi kekuasaan dan pengaruh. AUKUS memperkenalkan model baru berupa aliansi yang berorientasi pada inovasi teknologi, interoperabilitas militer, dan *deterrence* berbasis maritim.

Salah satu aspek paling menonjol dari AUKUS adalah kesepakatan untuk membantu Australia memperoleh kapal selam bertenaga nuklir (*nuclear-powered submarines*). Ini adalah kali pertama sejak tahun 1958 Amerika Serikat membagikan teknologi nuklir militer kepada negara lain (selain Inggris). Hal ini menandai langkah besar dalam strategi aliansi Barat untuk membangun kekuatan bawah laut yang kompetitif terhadap *People's Liberation Army Navy* (PLAN) Tiongkok. “*This partnership will allow Australia to build at least eight nuclear-powered submarines, using American and British technology... It's a generational leap in capability.*” Ungkap para pemimpin AUKUS, transfer ini meliputi teknologi reaktor nuklir kecil untuk kapal selam, sistem senjata dan sensor bawah laut canggih, pelatihan personel Australia dalam pengoperasian dan pemeliharaan kapal selam nuklir, kolaborasi dalam desain, produksi, dan perawatan melalui bisnis industri pertahanan bersama.

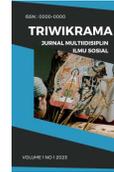
Selain kapal selam nuklir, AUKUS juga mencakup pengembangan dan berbagi teknologi pertahanan canggih lainnya yang semakin relevan dengan dinamika keamanan di abad ke-21. Pengembangan *artificial intelligence* (AI) untuk sistem senjata dan analisis data intelijen dipandang sebagai langkah strategis untuk mengimbangi perkembangan AI oleh Tiongkok yang semakin berkembang. Selain AI, AUKUS juga memprioritaskan pengembangan teknologi pertahanan lainnya seperti, sistem tak berawak dan otonom; *Quantum technologies* untuk komunikasi aman dan komputasi militer; *Cybersecurity* dan integrasi jaringan pertahanan digital antar anggota AUKUS. Langkah ini dirancang untuk melampaui kemampuan konvensional dan mendorong *technological offset* terhadap keunggulan numerik Tiongkok dalam personel militer dan kapal permukaan.

Strategi AUKUS jelas mencerminkan penyeimbangan kapabilitas (*capability balancing*) bukan sekadar respons terhadap jumlah kapal atau pasukan Tiongkok, melainkan pada kualitas militer strategis. Australia, dengan bantuan AUKUS, akan memasuki kelompok eksklusif negara yang memiliki kemampuan bawah laut dengan jangkauan global, pengintaian dalam, dan efek penangkalan kuat. Modernisasi ini memberi beberapa efek strategis seperti, menunda agresi Tiongkok melalui *deterrence* dan membagi beban militer Amerika Serikat dan Inggris melalui sekutu regional yang semakin mandiri. Hal ini akan membangun poros teknologi pertahanan barat yang eksklusif dan mampu mengimbangi pengaruh serta ekspansi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam konteks inilah AUKUS hadir sebagai bentuk nyata dari “*balance of threat*” sebagaimana yang dijelaskan oleh Stephen M. Walt. Menurut teori tersebut, negara-negara akan memiliki kecenderungan untuk membentuk aliansi bukan hanya berdasarkan kekuatan negara lain, tetapi berdasarkan ancaman yang dirasakan, seperti kapabilitas militer, niat agresif, dan kedekatan geografis. AUKUS telah menjadi manifestasi konkret dari logika ketiga anggotanya dalam merespons potensi ancaman Tiongkok yang semakin dekat secara geografis, agresif dalam niat, dan sangat kuat dalam kapabilitas.

### **3. Respon Kawasan Indo-Pasifik : Implikasi Terhadap Konflik Laut China Selatan**

Laut China Selatan telah lama menjadi pusat perhatian dalam dinamika geopolitik kawasan. Tiongkok, dengan klaim kontroversialnya yang dikenal sebagai *nine dash line*, telah membangun berbagai instalasi militer di pulau-pulau buatan dan secara agresif telah memperluas kontrol atas wilayah laut yang juga diklaim oleh negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Terlepas dari keputusan arbitrase internasional pada tahun 2016 yang membatalkan klaim Tiongkok, Beijing tetap melanjutkan kebijakannya, termasuk melakukan patroli militer, intimidasi terhadap nelayan, dan konfrontasi dengan kapal penjaga pantai negara lain di kawasan. Melihat kondisi ini, munculnya AUKUS telah mendatangkan berbagai pendapat, tetapi semuanya akan mengerucut kepada strategi penyeimbangan kekuatan sekutu terhadap ekspansi Tiongkok yang semakin agresif.



Pembentukan Perjanjian AUKUS ini dinilai sangat tergesa-gesa dan ternyata menimbulkan syok bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik khususnya negara-negara di Asia Tenggara. Akibat kurangnya koordinasi, pembentukan AUKUS mendapat beragam respon serta membangkitkan spekulasi dan asumsi terkait kebijakan dari ketiga negara ini. Hadirnya AUKUS akan menguji kemampuan Asia Tenggara untuk saling bekerja sama, terkhusus dalam menanggapi ketegangan konflik yang berlangsung di Laut China Selatan. Kemunculan AUKUS telah memberi ruang untuk berkembangnya beragam respon oleh negara-negara di Asia Tenggara, mengingat wilayah mereka berada di garis terdepan konflik dengan China.

Filipina dan Singapura mengambil tindakan dan respon yang mendukung adanya kerjasama AUKUS ini. Seperti yang kita ketahui kedua negara ini sedang menghadapi konflik perbatasan melawan China di kawasan Laut China Selatan. Dengan adanya AUKUS, besar harapan kedua negara ini agar Amerika bisa mengimbangi kekuatan China yang semakin agresif di kawasan Indo-Pasifik. Melalui pernyataan Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin menyatakan pernyataan yang menyambut baik terbentuknya AUKUS dan memperjelas bahwa AUKUS dapat menjaga kestabilan dan keamanan regional kawasan Indo-Pasifik serta menegaskan bahwa AUKUS bukanlah bentuk atau upaya untuk memperoleh senjata nuklir karena tidak melanggar SEANWFZ dan NPT. Demikian pula Singapura yang melalui Perdana Menteri Lee Hsein Loong mengungkapkan bahwa Singapura akan mendukung AUKUS agar dapat memberi kontribusi yang membangun perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Indonesia dan Malaysia di sisi lain tampak memberikan respon yang berlawanan dengan keberadaan kerjasama AUKUS. Kedua negara ini mengkhawatirkan bahwa AUKUS akan menciptakan perlombaan senjata dan militer yang berujung mengancam perdamaian dan kestabilan kawasan. Kemenlu Indonesia menyatakan “Dengan hati - hati” mengenai AUKUS dan menekankan bahwa Indonesia sangat prihatin dengan adanya perlombaan senjata dan kekuatan yang terus berlangsung di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia mengingatkan Australia agar terus mematuhi kewajiban non-proliferasi nuklirnya dan menjaga Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC). Perdana Menteri Malaysia pun turut mengungkapkan rasa prihatinnya terkait pembentukan AUKUS yang dinilai dapat menjadi katalis dalam perlombaan kekuasaan dan meningkatkan risiko provokasi bagi beberapa pihak untuk lebih agresif lagi dalam bertindak. Sedangkan negara-negara Asia Tenggara lainnya masih memilih untuk memihak pada China karena ketergantungannya terhadap China. Adapun Thailand memilih untuk tetap berada di zona netral dan lebih berhati-hati karena ingin menjaga hubungan yang baik dengan kedua negara hegemoni ini.

Dari perspektif strategis, kemunculan AUKUS tidak hanya melambangkan respons terhadap kebangkitan kekuatan militer Tiongkok, tetapi lebih lagi telah menjadi simbol dari perubahan dalam logika keamanan kawasan. AUKUS mencerminkan pergeseran kooperatif ke arah kompetitif, dari dialog ke *deterrence*, dan dari kepercayaan multilateral ke aliansi terbatas. Dalam konteks Laut China Selatan, AUKUS telah menandai dimulainya era baru di mana kekuatan eksternal dianggap sebagai elemen yang vital dalam menjaga keseimbangan kekuatan sekaligus sebagai pendorong stabilitas yang bersyarat.

Dengan demikian, pembahasan AUKUS tidak dapat dipisahkan dari dinamika Laut China Selatan. Kehadirannya telah memengaruhi cara negara-negara kawasan melihat konflik tersebut, bukan hanya sebatas persoalan kedaulatan, tetapi juga sebagai konstelasi kekuatan global yang semakin kompleks. Masa depan AUKUS sebagai faktor stabilisasi jangka panjang atau justru pemicu eskalasi konflik, sangat bergantung kepada para aktor dalam mengelola intensi strategis dan upaya komunikasi dengan negara-negara lain di kawasan.



#### 4. Masa Depan AUKUS dan Tantangan Strategis yang Dihadapi

Walaupun menjanjikan, AUKUS juga menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang kompleks, yang dapat menghambat efektivitas serta keberlanjutan inisiatif ini. Tantangan internal seperti perbedaan prioritas strategi nasional antara ketiga negara ini berisiko menciptakan asimetris dalam komitmen dan pembagian beban strategis, terutama jika terjadi perubahan kepemimpinan politik di salah satu negara. Selain itu, proyek AUKUS, terutama pengadaan kapal selam nuklir, menuntut koordinasi teknis dan legal yang sangat kompleks. Hal ini menuntut konsistensi politik dan kesiapan industri dalam jangka panjang, tanpa adanya jaminan bahwa semua negara akan mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Tantangan eksternal seperti respons dan eskalasi dari Tiongkok, dimana Beijing secara terbuka menentang AUKUS dan menyebutnya sebagai bentuk “mentalitas Perang Dingin”. Eskalasi ini berpotensi menciptakan ketegangan militer lebih besar di kawasan dan membatasi ruang diplomasi kolektif, terutama bagi negara-negara non-blok seperti ASEAN. Fragmentasi regional juga menjadi tantangan eksternal, dimana AUKUS dapat memperdalam perpecahan dalam struktur keamanan Indo-Pasifik. Negara-negara ASEAN terpecah antara mendukung *status quo* atau menghindari keterlibatan dalam rivalitas kekuatan besar, ketidakpastian arah QUAD dan hubungannya dengan AUKUS. Hal ini menimbulkan risiko delegitimasi sistem keamanan regional berbasis konsensus, dan mendorong penguatan eksklusivitas militer.

AUKUS bukan sekedar aliansi pertahanan konvensional, melainkan inisiatif strategi jangka panjang yang dirancang untuk memperkuat postur kekuatan negara-negara anggotanya dalam menghadapi tantangan di Indo-Pasifik. Masa depan AUKUS bergantung pada dua arah utama perkembangan, yakni modernisasi kapabilitas pertahanan Australia dan integrasi teknologi canggih. Arah masa depan AUKUS menunjukkan transformasi dari aliansi militer menjadi koalisi strategis teknologi tinggi yang mampu beradaptasi dengan dinamika ancaman baru, bukan hanya dari Tiongkok, tetapi juga aktor non-negara dan tantangan transnasional seperti keamanan siber dan gangguan rantai pasok.

Masa depan AUKUS terletak pada keseimbangan antara ambisi strategis dan realitas politik. Di satu sisi, AUKUS berpotensi menciptakan struktur *deterrence* yang efektif terhadap Tiongkok melalui keunggulan teknologi dan proyeksi kekuatan. Namun di sisi lain, tantangan koordinasi, fragmentasi kawasan, dan respons dari Tiongkok menuntut manajemen strategis yang cermat dan keberlanjutan politik jangka panjang. Dalam konteks teori *balance of threat*, masa depan AUKUS merepresentasikan dinamika strategis klasik, di mana persepsi ancaman menjadi katalis pembentukan aliansi, namun keberhasilan aliansi tersebut bergantung pada kemampuan internal untuk bertahan dan beradaptasi dalam lanskap keamanan yang dinamis.

#### KESIMPULAN

Aliansi AUKUS yang dibentuk oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia merupakan respons strategis terhadap meningkatnya kekuatan militer dan ekspansi agresif Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Dengan menggunakan teori *balance of threat* dari Stephen Walt, artikel ini menilai bahwa AUKUS hadir sebagai bentuk penyeimbangan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Tiongkok berdasarkan kapabilitas agregat, kedekatan geografis, niat agresif, dan kemampuan ofensifnya. AUKUS diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat postur pertahanan kolektif Blok Barat di Indo-Pasifik, dengan pendekatan penyeimbangan berbasis teknologi dan modernisasi militer, khususnya di bidang kapal selam bertenaga nuklir, AI, dan pertahanan siber. Meskipun AUKUS belum menunjukkan bentuk konfrontasi langsung, kehadirannya mencerminkan pergeseran penting dalam arsitektur keamanan kawasan: dari diplomasi multilateral yang inklusif ke arah aliansi terbatas berbasis *deterrence* teknologi tinggi. AUKUS tidak hanya fokus pada peningkatan kerja sama militer, tetapi juga teknologi

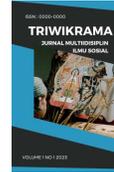
pertahanan mutakhir seperti kapal selam bertenaga nuklir, kecerdasan buatan, sistem bawah laut, dan teknologi kuantum.

Langkah ini mencerminkan upaya *balancing* berbasis teknologi terhadap dominasi Tiongkok. Meskipun menjanjikan, AUKUS tetap menghadapi potensi tantangan yang dapat menghambat kesuksesannya. Tantangan internal seperti perbedaan kepentingan politik antaranggota dan tantangan eksternal berupa resistensi dari Tiongkok serta fragmentasi kawasan, turut menjadi pertimbangan dalam menjamin kepastian AUKUS sebagai upaya penyeimbang Tiongkok di kawasan. Reaksi yang muncul dari negara-negara kawasan, khususnya Asia Tenggara, memperlihatkan fragmentasi sikap terhadap AUKUS. Sebagian menyambutnya sebagai sarana penyeimbang terhadap agresi Tiongkok, sementara yang lain mengkhawatirkan eskalasi dan perlombaan senjata yang bisa mengganggu stabilitas regional.

Dengan demikian, AUKUS adalah wujud nyata dari transformasi dinamika keamanan global dan regional, sekaligus menjadi indikator utama bahwa rivalitas strategis di Indo-Pasifik telah memasuki fase baru. Keberlanjutan efektivitas AUKUS akan sangat bergantung pada kapasitas internal anggotanya untuk mempertahankan komitmen jangka panjang dan kemampuan menghadapi tantangan geopolitik yang terus berubah. Namun, masa depan AUKUS berpotensi mentransformasi aliansi ini menjadi koalisi strategis teknologi tinggi yang mampu menjaga stabilitas dan mencegah dominasi tunggal di kawasan Indo-Pasifik.

## REFERENSI

- Apriliana, A. N. R. (2024). "Through the Reactive to Proactive Thinking: Foresight of the AUKUS Agreement Rational Practice in the Indo-Pacific". *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 5(2), 155-195.
- Cheng, M. (2022). AUKUS: "The changing dynamic and its regional implications". *European Journal of Development Studies*, 2(1), 1-7.
- Ding, R. (2023). "An Exploration of the AUKUS Trilateral Partnership". *Studies in Social Science Research*, 4(1), 90-100.
- Edel, C. "The United States, Britain, and Australia Announce the Path Forward for AUKUS", CSIS, 16 Maret 2023 [Online]. Tersedia: <https://www.csis.org/analysis/united-states-britain-and-australia-announce-path-forward-aucus>. [Diakses: 30 Juli 2025].
- EICHENSEHR, E. B. K. E. (2022). "Contemporary Practice of the United States Relating to International Law". *American Journal of International Law*, 116(2), 417-422.
- Imannuridin, Y., Sudiarmo, A., & Sianturi, D. (2024). "The Impact Of The Aukus Alliance On China's Influence In The Indo-Pacific Region". *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 3(5).
- Kennedy, P. S. J. (2022). "Analysis of the Indo-Pacific Outlook and Impact of the AUKUS Triatral Pact". *Sarcouncil Journal of Economics and Business Management*, 1(8), 1-12.
- Korwa, J. R., & Wambrau, M. S. (2023). "Constructivist Analysis of the Establishment of the AUKUS Security Pact and its Implications for Regional Stability in the Indo-Pacific". *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(1).
- Leonova, O. (2022). "The Impact of the Strategic Partnership AUKUS on the Geopolitical Situation in the Indo-Pacific Region". *Vestnik mezhdunarodnykh organizatsii-international organisations research journal*, 17(3), 194-211.
- Mas' udi, S. Y. F. (2020). "Analysis of the Australian Alliance's Dilemma". *Journal of PIR: Power in International Relations*, 4(2), 190-200.



- 
- Montolalu, R. R. K. (2022). “US Indo-Pacific Strategy: The Utilization of The US-Australia Military Alliance as Part of The US Balance of Power Strategy to Respond to China Influence in Indo-Pacific Region”. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity*, 8(2), 222-233.
- Nindya, A. P., & Abiyya, R. A. (2022). “Pengaruh AUKUS terhadap Stabilitas Indo-Pasifik dan Sikap Indonesia [The Influence of AUKUS to Indo-Pacific Regional Stability and Indonesia’s Stance]”. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(1), 67-84.
- Rosyidin, M. (2023). *Teori hubungan internasional: dari perspektif klasik sampai non-Barat*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Sumadinata, W. S. (2022). “Analysis of the AUKUS Agreement on Security in the South China Sea Region”. *Neo Journal of economy and social humanities*, 1(4), 265-271.
- Tawakal, A. (2022). “Dinamika Keamanan Indo-Pasifik dan Uni Eropa Terkait Aliansi AUKUS”. *Global Insight Journal*, 7(1).
- Walt, S. M. (1985). “Alliance formation and the balance of world power”. *International security*, 9(4), 3-43.